

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN

IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT POLICY THROUGH ECONOMIC RECOMMENDATIONS BUSINESS PROGRAMS

Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Riau

E-mail: diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Diterima: 24 Oktober 2019; Direvisi: 24 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analisis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan, pemberdayaan.*

Abstract

Urban Economic Business is a government policy to improve the community's economy with an empowerment approach, this study aims to see the implementation of community empowerment policies through the Urban Economic Business Program. This research was conducted in Pekanbaru City by taking three villages as samples, sampling based on the level of success in implementing the Urban Economic Business program with indicators of bad credit, number of beneficiaries and the amount of revolving funds. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation and interviews then the data collected were analyzed descriptively. The results of the study found that the Implementation of Community Empowerment Policy Through the Urban Economic Business Program in Pekanbaru City has not been implemented as a whole, several villages have not implemented it properly in accordance with technical instructions and implementation instructions, this is due to the lack of resource managers who understand and master the tasks that must be done like the credit analyst part. Suggestions that can be given are holding training and training for managers so that they understand their duties and responsibilities.

Keywords: *implementation, policy, empowerment.*

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu program pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat, program ini disebut dengan Program Usaha Ekonomi kelurahan. Program ini sudah lama dilaksanakan, meskipun di beberapa kelurahan sudah berhasil dalam melaksanakan program ini tapi ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, misalnya sistem keikut-sertaan pelatihan yang diadakan, jumlah dana pinjaman untuk modal usaha, maupun pengguna dana pinjaman untuk modal, (Alfatih, 2010)

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kemiskinan dapat menghambat program pembangunan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Program ini menjadi hal yang harus segera dilaksanakan, dengan meningkatnya perekonomian maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dilakukan dalam percepatan peningkatan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005. Adapun proses kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menggulirkan Program Usaha Ekonomi Kelurahan sejak Tahun 2005 berdasarkan Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha/kelurahan. Berdasarkan data dari BPS Kota Pekanbaru, angka kemiskinan dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan

Tabel 1. Angka Kemiskinan di Kota Pekanbaru 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	381.287	399.451	416.479	435.082	473.788

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2018

Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Pada awal program ini dijalankan yaitu pada tahun 2005, kelurahan yang menerima bantuan adalah kelurahan Umban Sari dan Kelurahan Muara Fajar dimana masing – masing kelurahan di berikan dana sejumlah Rp. 500.000.000,- yang dianggarkan dari APBD Provinsi Riau, dan sampai dengan tahun 2017 jumlah kelurahan yang telah mendapatkan bantuan modal sosial sudah berjumlah 58 (lima puluh delapan) kelurahan dimana dana yang digulirkan diberikan secara bertahap untuk kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini mengambil tiga kelurahan yang tingkat perkembangannya berbeda yaitu cepat, sedang dan sangat rendah dilihat dari peningkatan jumlah dana, pengelolaan manajemennya, tingkat simpan pinjam, produktifitas usaha yang terus berkelanjutan, serta tingkat kemacetan kredit yang rendah, tingkatan perkembangan dapat dilihat pada tabel perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing-masing kelurahan berikut ini:

Tabel 2. Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Maharatu Jaya 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2015	586	3.927.600.000	79.382.124	62.876.944
2	2016	646	4.170.600.000	88.429.085	125.032.422
3	2017	818	6.483.000.000	92.080.700	151.833.111

Sumber: Laporan Keuangan UEK Maharatu Jaya, 2018.

Tabel 3. Perkembangan Usaha Ekonomi kelurahan Sidomulyo Barat 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2013	325	2.035.000.000	13.235.653	215.346.562
2	2014	476	2.713.550.000	25.015.327	263.122.444
3	2015	539	3.084.550.000	30.456.657	239.047.922

Sumber: Laporan Keuangan UEK Sidomulyo Barat, 2018.

Tabel 4. Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Tanah Datar 2015 - 2017.

No.	Tahun	Jumlah Pemanfaat	Dana Bergulir (Rp)	Laba	Jumlah Tunggakan
1	2013	433	2.509.000.000	6.189.124	244.082.063
2	2014	496	3.157.500.000	18.323.822	284.801.157
3	2015	580	3.930.000.000	8.365.589	301.000.000

Sumber: Laporan Keuangan UEK Tanah Berlian, 2018.

Kebijakan Publik

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya.

Beberapa pakar dalam Safi'i (2009) mengatakan tentang makna kebijakan publik yang pertama yaitu: Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak (*whatever governments choose to do or not to do*). Secara padat Tachjan (2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Nugroho (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan

mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi Kebijakan

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, Birkland dalam Akib (2012). Menurut Ripley dalam Sujianto (2008) implementasi merupakan suatu tahapan diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan implementasi pada tahap ketiga proses kebijakan. Tahap pertama penyusunan agenda, tahap kedua formulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak dari kebijakan. Menurut *Van Meter dan Van Horn* dalam Winarno (2012) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu / kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. *Lester* dalam Sujianto (2008) mengemukakan implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu sebab akibat. Dikatakan sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat dan efek. Dalam hal yang berbeda menurut Erwan & Ratih (2013) implementasi kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang *deleverly mechanism* dimana ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai

tujuan kebijakan. Kemudian Soluhuddin dalam Ramadayani (2016) menjelaskan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (*statuta*) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Matland dalam Fischer (2015) menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2006). Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terhambat oleh karena pemerintah tidak mengetahui untuk siapa, apa pendekatan yang sesuai, dan bagaimana caranya program pembangunan tersebut dilaksanakan. Program pembangunan yang terpusat pada pemerintah seringkali mencapai tujuannya secara makro namun pada hakikatnya komunitas yang berada di tingkat mikro tidak mendapat pengaruh ataupun tidak dijangkau oleh pembangunan tersebut

Menurut *Naning Mardianah* dalam Wirutomo dkk (2003) pemberdayaan dimaknai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Dengan memperhatikan berbagai pandangan termasuk bias-bias terhadap konsep pemberdayaan itu, beberapa langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaannya, yaitu:

1. Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*)
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Sedangkan menurut Prianarka dalam Rusli, pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat tentang keamanan, antisistem, antistruktur dan antideterminisme.

Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana individu, kelompok yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Adi (2008). Menurut Sumodiningrat (1997) pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan serta membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik *snowball sampling* yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju

yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat. Setelah data terkumpul dari setiap informan penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan, Kepala Bidang Pengembangan UEM, Pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing-masing Kelurahan dan Masyarakat sasaran kebijakan

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis kualitatif, teknik analisa kualitatif yang digunakan adalah teknik triangulasi, yakni teknik untuk melihat kesahihan bersama dan korelasi yang kuat antar data dan dari berbagai sumber dengan tahapan analisis data adalah: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*)

Peningkatan akses ini adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan maksud meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi. Fasilitas yang dimaksud adalah modal usaha yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dengan syarat masyarakat harus memiliki sebuah usaha sehingga penambahan modal yang diberikan dapat menunjang produktivitas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Banyak masyarakat yang memiliki usaha namun usahanya tidak dapat berkembang dengan baik disebabkan kekurangan modal usaha, oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui peminjaman

modal usaha yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomiannya, pengelola usaha ekonomi Kelurahan Maharatu membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal usaha dengan memberikan syarat adanya sebuah usaha yang telah dijalankan, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Maharatu sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu meningkatkan dorongan berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka.

Syarat yang diberikan oleh Kelurahan Maharatu untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal bukanlah untuk mempersulit masyarakat, namun lebih jauh adalah untuk memastikan bahwa modal yang diberikan dapat dikembalikan dengan cara mencicil sehingga modal yang sudah dikembalikan dapat kembali digulirkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, seperti kutipan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat berikut ini:

“Salah satu syarat masyarakat yang mengajukan pinjaman modal haruslah memiliki sebuah usaha, untuk itu mereka harus membuat sebuah proposal tentang usaha mereka, berapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan bagaimana prospek usaha mereka kedepannya “

Setiap proposal pengajuan pinjaman yang diberikan oleh masyarakat, pihak atau pengelola usaha ekonomi kelurahan juga melakukan survey ke rumah dan ke tempat usaha mereka untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memang memiliki sebuah usaha, hal ini juga untuk mengontrol pemberian bantuan dana agar tersalur sesuai dengan tujuan pemberian bantuan modal ini.

“Kita memberikan syarat kepada masyarakat untuk pinjaman modal yaitu adanya sebuah usaha, tidak melihat besar atau kecilnya, yang penting usaha yang mereka jalankan itu jelas sehingga modal yang kita berikan betul – betul bermanfaat untuk mereka”

Prosedur yang berlaku ini tidaklah memberatkan masyarakat, karena menurut mereka pinjaman bantuan modal di Kelurahan Maharatu ini tidaklah sulit, Pemberian bantuan modal usaha dilakukan untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk pengembangan usaha, oleh sebab itu syarat utama diberikannya bantuan modal adalah adanya usaha yang telah berjalan, usaha tersebut memiliki prospek yang bagus sehingga apabila diberikan bantuan dana akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk kemajuan usaha kedepannya, seperti ungkapan dari masyarakat:

“Ga susah meminjam modal di UEK - SP Maharatu Jaya ini, yang penting kami punya usaha, mau usaha dagang, tani atau apa ajalah”

Pelaksana atau pengelola dari program usaha ekonomi kelurahan pada awal berdirinya tidaklah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pengelola terhadap dana bergulir yang telah mereka salurkan, meskipun peningkatan akses kedalam asset produksi dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah peminjam yang banyak, namun pengelola usaha ekonomi kelurahan pada Kelurahan Sidomulyo Barat tidak memastikan apakah masyarakat peminjam tersebut benar – benar memiliki sebuah usaha, hal ini menyebabkan angka kredit macet menjadi tinggi kurang berkembangnya modal yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat disebabkan karena kurangnya perhatian dari pengelola sehingga dana yang disalurkan tidak terkontrol dengan baik. Masalah ini terjadi

diakibatkan kurang seriusnya pengelola dalam melaksanakan program ini sehingga pada saat dilakukan penggantian kepengurusan dapat dilihat adanya kemajuan.

Pada Kelurahan Tanah Datar dengan usaha ekonomi kelurahan yang bernama tanah berlian, program pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan termasuk tidak berjalan, kepemilikan usaha bukanlah menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan modal, setiap masyarakat yang mengajukan pinjaman dengan mudah disetujui oleh pengelola sehingga pernyaluran dana tidak terkontrol, dana yang bergulir pada masyarakat tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, namun lebih banyak dijadikan untuk kebutuhan konsumtif.

Permasalahan pada seleksi pemanfaat dana, dimana seharusnya pemanfaat program ini adalah masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian mereka dengan peminjaman dana untuk pengembangan usaha yang mereka miliki, namun dalam pelaksanaannya siapa saja bisa mendapatkan pinjaman dana ini dan tidak dilakukan penyeleksian terlebih dahulu sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat peminjam dana yang tidak mengembalikan dana tersebut.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat

Rakyat sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai produsen atau penjual merupakan posisi yang lemah dimana ada begitu banyak pesaing dari perusahaan besar yang akan menjadi *competitor* yang secara tidak langsung akan mematikan usaha mereka, disinilah pemerintah bertindak sebagai pelindung yang akan menjamin usaha yang dijalankan masyarakat akan tetap berjalan dengan memperkuat transaksi masyarakat dengan menyediakan fasilitas sebagai jaminan

keberlangsungan transaksi masyarakat.

Mitra usaha sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan sebuah usaha, adanya mitra akan memudahkan masyarakat pelaku usaha dalam mendapatkan *supply* produk atau bahan baku dan penyaluran hasil dari usaha masyarakat, adanya mitra usaha akan memberikan kepastian untuk hasil yang telah diproduksi tersalurkan atau menghasilkan *out put* berupa pendapatan yang jelas, sehingga mengurangi resiko hasil produksi tidak terjual. Dari hasil wawancara dengan pengelola dari Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Kelurahan Tanah Datar dapat diketahui bahwa akses kemitraan usaha belum ada dilaksanakan, artinya masyarakat menyalurkan atau menjual secara mandiri ke pembeli atau mitra usaha yang mereka cari mereka sendiri, hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola UEK – SP masing – masing kelurahan dan kepada masyarakat pemanfaat.

“Kami menjual sendiri hasil perkebunan kami kepada masyarakat dan kepasar – pasar yang ada di Kota Pekanbaru “

“Tidak ada koperasi, biasanya mereka jual langsung kemasyarakat, terutama para petani sayur, kalau masyarakat yang berdagang mereka juga jual masing – masing, ada yang di warung, ada yang dipasar “

Pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan juga mengakui bahwasanya memang tidak ada wadah yang mereka sediakan, seperti kutipan berikut ini:

“Menyediakan mitra usaha tidak ada sama sekali, namun apabila ada masyarakat yang meminta bantuan untuk mencarikan link untuk menyalurkan hasil usaha, kami berusaha untuk mencarikannya, pernah ada masyarakat yang membuat usaha sandal hotel, namun tidak tahu kemana harus

disalurkan, dan meminta kami mencari tempat menjualnya, hal – hal seperti ini biasanya akan kami bantu “

Adanya wadah kemitraan usaha yang di sediakan oleh pelaksana program pemberdayaan masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan, wadah kemitraan usaha yang disediakan akan menjamin hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat, masyarakat tidak akan takut bahwa hasil produksi mereka akan sia – sia karena setiap hasil produksi sudah ada yang menampungnya, dalam hal ini pemerintah dapat menyediakan koperasi sebagai wadah yang akan menjualkan secara langsung produk – produk yang mereka hasilkan, wadah kemitraan yang akan meningkatkan posisi transaksi belum disediakan, dikarenakan usaha yang dijalankan masyarakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan pembeli. Namun demikian seharusnya pemerintah tetap menyediakan wadah kemitraan yang akan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa usaha yang mereka jalankan di dukung oleh pemerintah melalui penyediaan koperasi, tapi disini masyarakat pemanfaat program dituntut untuk lebih mandiri dalam menyalurkan hasil produksi mereka.

Satu usaha pemerintah adalah memberikan informasi dalam pengembangan usaha kepada masyarakat pemanfaat program dengan memberikan arahan bagaimana cara – cara pengembangan usaha, memberikan informasi mengenai apa yang menjadi trend penjualan saat ini atau apa yang sedang meningkat permintaan pasarnya serta bagaimana cara memasarkan hasil usaha sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dengan signifikan. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat karena mental mereka yang sudah terkunci dengan kebiasaan – kebiasaan tanpa melihat bahwasanya permintaan pasar akan selalu mengalami

perubahan, dan apabila pelaku ekonomi tidak mengikuti perkembangan yang terjadi maka dapat dipastikan usaha mereka akan cepat hancur atau tidak berkembang. Apabila dilihat dari usaha yang dijalani para pemanfaat bantuan modal ini maka dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai cara – cara pengembangan usaha maupun strategi – strategi pemasaran produk karena rata – rata masyarakat melakukan usaha secara konvensional seperti berdagang di warung dan dipasar begitu juga masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, mereka melakukan usaha pertanian dan penjualan hasil pertanian dengan cara yang sama dari tahun-ke tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan masyarakat

Pada tiga kelurahan yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengubah kondisi perekonomian mereka sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaat dana yang meningkat setiap tahunnya, kemudian dorongan yang diberikan oleh pemerintah dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat miskin pada beberapa kelurahan sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan meminjam bantuan modal usaha dimana prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada kelurahan yang tidak melihat keadaan ekonomi masyarakat dimana tidak semua pemanfaat dana bukanlah masyarakat miskin. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat dalam menggunakan dana yang dipinjam menyebabkan masih banyak yang menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif dan tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya sehingga pada beberapa kelurahan Usaha Ekonomi Kelurahan tidak berkembang yang disebabkan angka kredit macetnya yang tinggi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kelurahan di kota pekanbaru pada beberapa kelurahan telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan, sedangkan beberapa kelurahan belum, pada penelitian yang mengambil tiga sampel kelurahan dengan kriteria berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil didapat hasil penelitian sebagai berikut: Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*) telah dilakukan dengan baik oleh pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan, masing-masing kelurahan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha, masyarakat tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan dalam melakukan pinjaman modal, apabila masyarakat sudah memiliki sebuah usaha yang akan dikembangkan dan ditingkatkan.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan belum dilakukan, masyarakat yang memanfaatkan dana atau modal sosial berusaha sendiri dalam melakukan pengembangan usahanya, mitra usaha yang seharusnya dapat meningkatkan transaksi masyarakat dicari oleh masyarakat sendiri, pemerintah belum berperan dalam menyediakan maupun menjadi perantara antara masyarakat dengan mitra usaha.

SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi maka bagi pengelola untuk dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, Memberikan atau menyediakan wadah untuk menampung hasil usaha masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produk yang mereka buat, melakukan

penyeleksian dan lebih teliti dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pengembalian dana dan menyediakan sumberdaya manusia yang khusus menangani masalah penunggakan cicilan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
2. Terimakasih kepada Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Tanah Datar terutama pengelola UEK-SP yang telah memberikan izin melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada).
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Unpad Press.
- Erwan & Ratih Sulistyastuti, Dyah. (2013). *Implementasi gam Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. UGM Press.
- Fischer Frank, et.all., 2015., *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*., CRS Press Taylor and Francis Group., Boca Raton London New York.
- Hikmat H. 2006., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.*, Humaniora., Bandung.

- Moleong, L. J.(2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nogi.,Hassel (2003)., *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran* Nagel. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Nugroho, D. Riant, (2003). *Kebijakan publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*,Cetakan 2. Jakarta: Gramedia.
- Ramadayani, F., Rusli, Z., & Yuliani, F. Efektivitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(1).
- Rusli, Z., Sahuri, C., & Mashur, D. Penerapan Social Entrepreneurship dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2).
- Safi'i.(2009). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Sujianto. (2009). *Pemberdayaan menuju Masyarakat Mandiri*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumodiningrat.(1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Bina Rena Parawira., Jakarta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Winarno. Budi (2012).*Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Yogyakarta: CAPS.
- Wirutomo dkk. (2003). *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Cipruy.